

ALIH FUNGSI LAHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT AGRARIS DI KAWASAN PARIWISATA BALI: STUDI KASUS PARQ UBUD

Ni Putu Anita Devi¹; Hendi Irawan²

^{1,2}Program Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available online Juli 2026

Email:

putuanitadevi@gmail.com,

hendiirawankesos@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Alih fungsi lahan pertanian akibat perkembangan investasi pariwisata menjadi salah satu tantangan yang memengaruhi keberlanjutan masyarakat agraris di Bali, khususnya di kawasan Ubud. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana investasi pariwisata yang mendorong alih fungsi lahan memengaruhi perubahan struktur sosial masyarakat agraris di Ubud melalui studi kasus pembangunan Parq Ubud. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus serta memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi artikel ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan pemberitaan media daring yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian diinterpretasikan menggunakan Perspektif Teori Ketergantungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Parq Ubud telah mendorong alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan komersial yang berdampak pada bergesernya penguasaan sumber daya agraris, melemahnya keberlangsungan sistem Subak, serta perubahan mata pencaharian masyarakat menuju sektor jasa dan pariwisata. Meskipun pemerintah telah memiliki regulasi mengenai perlindungan lahan pertanian dan penataan ruang, implementasinya belum mampu mengendalikan tekanan investasi terhadap kawasan agraris. Analisis Teori Ketergantungan menunjukkan bahwa pembangunan Parq Ubud membentuk hubungan yang tidak seimbang antara investor sebagai pemilik modal dan masyarakat agraris lokal yang semakin kehilangan penguasaan atas aset produksi serta bergantung pada perkembangan sektor pariwisata. Penelitian ini menegaskan bahwa alih fungsi lahan, investasi pariwisata, dan perubahan struktur sosial masyarakat agraris merupakan proses yang saling berkaitan dan dapat dipahami melalui Perspektif Teori Ketergantungan.

Kata kunci: alih fungsi lahan, investasi pariwisata, masyarakat agraris, Parq Ubud, Teori Ketergantungan

Abstract

The conversion of agricultural land driven by tourism investment has become a major challenge affecting the sustainability of agrarian communities in Bali, particularly in Ubud. This study aims to analyze how tourism investment that drives land conversion influences the transformation of the agrarian social structure in Ubud through a case study of the Parq Ubud development. This research employed a qualitative approach with a case study design and utilized secondary data collected through library research, including scientific articles, books, laws and regulations, and relevant online news reports. The data were analyzed using qualitative analysis techniques consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, and were subsequently interpreted through the Dependency Theory perspective. The findings indicate that the development of Parq Ubud has accelerated the conversion of agricultural land into commercial areas, resulting in shifts in the control of agrarian resources, weakening the sustainability of the Subak system, and encouraging occupational changes from agriculture to the tourism and service sectors. Although the government has established regulations concerning agricultural land protection and spatial planning, their implementation has not been effective in controlling investment pressure on agrarian areas. From the perspective of Dependency Theory, the development of Parq Ubud has created an unequal relationship between investors as capital owners and local agrarian communities, who have gradually lost control over productive assets and become increasingly dependent on the tourism sector. This study concludes that land conversion, tourism investment, and the transformation of the agrarian social structure are interconnected processes that can be comprehensively explained through the perspective of Dependency Theory.

Keywords: land conversion; tourism investment, agrarian society, Parq Ubud, Dependency Theory

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pariwisata telah menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah tujuan wisata. Sejalan dengan itu, ekspansi industri pariwisata turut meningkatkan kebutuhan ruang untuk pembangunan hotel, vila, restoran, kawasan komersial, maupun infrastruktur penunjang lainnya. Kondisi tersebut mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan nonpertanian sebagai dampak dari meningkatnya permintaan terhadap ruang pembangunan (Tjondronegoro, 1999). Alih fungsi lahan tidak hanya berdampak pada berkurangnya luas lahan produktif, tetapi juga memengaruhi struktur sosial masyarakat agraris yang selama ini menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Oleh karena itu, alih fungsi lahan pertanian tidak lagi dipandang semata sebagai masalah perubahan penggunaan lahan, melainkan sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan kehidupan petani. Hal ini terlihat melalui pangan keluarga yang terancam, kesempatan kerja petani yang semakin berkurang dalam sektor pertanian, pendapatan yang menurun, hingga kepemilikan lahan sawah yang semakin menyempit.

Fenomena tersebut menjadi perhatian penting di Provinsi Bali, wilayah yang selama beberapa dekade terakhir mengalami pertumbuhan pariwisata secara pesat. Berbeda dengan wilayah lain, lahan pertanian di Bali memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai sosial-budaya karena terintegrasi dalam sistem Subak yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana. Sistem tersebut tidak hanya mengelola air irigasi di lahan sawah, tetapi juga menjaga keharmonisan hidup masyarakat melalui pilar kebudayaan Bali dengan prinsip hubungan *parhyangan* (manusia dengan Tuhan), *pawongan* (manusia dengan manusia), serta *palemahan* (manusia dengan alam) (Windia et al., 2015). Namun, meningkatnya kebutuhan lahan untuk kepentingan pariwisata menyebabkan keberadaan lahan pertanian semakin menyusut. Data menunjukkan bahwa luas sawah di Bali mengalami penurunan dari 70.995 hektare pada tahun 2019 menjadi 64.474 hektare pada tahun 2024 atau berkurang sekitar 6.521 hektare dengan rata-rata penurunan sebesar 1,53% per tahun (NusaBali, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan pembangunan tidak hanya mengurangi luas lahan pertanian, tetapi juga berpotensi mengancam keberlanjutan tatanan sosial-budaya yang berkembang di dalamnya.

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu wilayah yang mengalami penyusutan lahan pertanian paling signifikan sebesar 1.745,80 hektare atau sekitar 14,82% selama periode 2019-2024 akibat berkembangnya aktivitas pariwisata (NusaBali, 2025). Salah satu kawasan Gianyar yang mengalami tekanan paling besar ialah Ubud, yang selama ini dikenal pada citra keaslian budaya dengan lanskap persawahan, sistem Subak, pemukiman perdesaan dengan kehidupan seni, serta tradisi masyarakat yang masih terpelihara (Picard, 2006). Daya tarik tersebut justru mendorong peningkatan investasi pada sektor akomodasi wisata dan properti sehingga kebutuhan terhadap lahan terus bertambah. Dalam situasi tersebut, lahan pertanian tidak lagi dipandang sebagai tempat untuk memproduksi pangan, melainkan sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai investasi tinggi. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa modal investasi mulai mendominasi dalam pembentukan tata ruang di kawasan wisata.

Salah satu bentuk nyata dari fenomena tersebut adalah pembangunan kompleks Parq Ubud di Banjar Tegallantang, Kecamatan Ubud. Pembangunan kawasan komersial dan residensial ini menjadi sorotan publik karena berdiri pada kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas sekitar 1,8 hektare serta melibatkan penguasaan sejumlah lahan milik masyarakat lokal (Tempo, 2025). Kasus Parq Ubud mencerminkan bagaimana penetrasi investasi pariwisata yang berpotensi mengubah pola penguasaan ruang, hubungan ekonomi, dan posisi masyarakat lokal di tengah berkembangnya industri pariwisata. Maka dari itu Parq Ubud dipilih sebagai studi kasus karena dinilai merepresentasikan dinamika perubahan ruang agraris yang berlangsung di kawasan wisata Bali.

Berbagai penelitian mengenai alih fungsi lahan akibat perkembangan pariwisata telah dilakukan dari berbagai perspektif. Penelitian Ramadhan dan Murti (2024) memperlihatkan bahwa perkembangan kawasan Metropolitan Sarbagita mempercepat alih fungsi lahan pertanian meskipun telah diterapkan kebijakan perlindungan melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Alih fungsi lahan Subak di Jatiluwih oleh penelitian Vitiara et al. (2024) menunjukkan adanya ancaman keberlanjutan sistem Subak sekaligus meningkatkan kerentanan ekologis kawasan. Sementara itu, Maheswari dan Budhi (2025) menjelaskan bahwa perkembangan akomodasi wisata mendorong alih fungsi lahan pertanian sehingga manfaat ekonomi pariwisata lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal dibandingkan masyarakat lokal. Di sisi lain, Pamungkas et al. (2024) mengungkapkan bahwa perubahan struktur sosial masyarakat petani dipengaruhi oleh proses modernisasi yang mengubah pandangan masyarakat terhadap sektor pertanian.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih mengkaji alih fungsi lahan dan perubahan struktur sosial secara terpisah sehingga hubungan antara keduanya belum banyak dianalisis secara komprehensif. Penelitian mengenai alih fungsi lahan cenderung menitikberatkan pada aspek spasial dan perlindungan kawasan pertanian, sedangkan kajian perubahan struktur sosial lebih berfokus pada pengaruh modernisasi terhadap masyarakat petani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan antara alih fungsi lahan akibat investasi pariwisata dan perubahan struktur sosial masyarakat agraris masih belum banyak dianalisis secara terpadu. Berangkat dari celah penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan analisis yang mengintegrasikan alih fungsi lahan, investasi pariwisata, dan perubahan struktur sosial masyarakat agraris dalam satu kerangka analisis. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana investasi pariwisata yang mendorong alih fungsi lahan memengaruhi perubahan struktur sosial masyarakat agraris di Ubud dalam perspektif Teori Ketergantungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Studi kasus memberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari suatu kejadian, individu, kelompok, institusi, atau proses tertentu yang menjadi fokus kajian (Wulandari et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam fenomena alih fungsi lahan dan perubahan struktur sosial masyarakat agraris dalam konteks nyata pembangunan Parq Ubud di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Kasus Parq Ubud dipilih karena merepresentasikan fenomena alih fungsi lahan pertanian yang berkembang di kawasan pariwisata sekaligus menjadi sorotan publik akibat pembangunan pada kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data meliputi artikel ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta pemberitaan media daring yang relevan dengan topik penelitian, seperti Tempo, BBC Indonesia, CNN Indonesia, dan NusaBali. Seluruh sumber dipilih secara purposif berdasarkan kredibilitas, relevansi, keterbaruan publikasi, serta kesesuaiannya dengan fokus penelitian mengenai alih fungsi lahan, investasi pariwisata, dan perubahan struktur sosial masyarakat agraris.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif Teori Ketergantungan untuk menjelaskan keterkaitan antara investasi pariwisata, alih fungsi lahan, dan perubahan struktur sosial masyarakat agraris pada kasus Parq Ubud.

PEMBAHASAN

1. Pembangunan Parq Ubud dan Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Agraris

Ubud telah berkembang sebagai salah satu kawasan pariwisata utama di Bali sejak diperkenalkannya konsep desa wisata pada dekade 1930-an (Pratama et al., 2024). Pada awal perkembangannya, aktivitas pariwisata masih berjalan berdampingan dengan sistem pertanian tradisional yang ditopang oleh sistem Subak. Subak merupakan organisasi mandiri kelompok petani yang mengelola sistem irigasi secara bergantian, mengalirkan air berurutan dari sawah bagian paling atas hingga ke area bawah sesuai kesepakatan kelompok (Vitiara et al., 2024). Keberadaan sektor pariwisata pada masa tersebut belum memberikan tekanan yang signifikan terhadap keberlangsungan ruang agraris karena berfokus pada daya tarik lokal alamiah serta perkembangan fasilitas wisata yang masih terbatas. Namun, pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi Bali sebesar 9,31% (*year-on-year*) pada tahun 2020 mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan kembali sektor pariwisata melalui pembukaan ruang investasi sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi (Santi & Utomo, 2021). Salah satu bentuk investasi tersebut diwujudkan melalui pembangunan kompleks komersial dan residensial Parq Ubud di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Parq Ubud dikembangkan oleh PT Parq Ubud Partners sebagai kawasan terpadu yang menyediakan berbagai fasilitas, seperti apartemen, vila, restoran, spa, pusat kebugaran, ruang kerja bersama (*co-working space*), hingga ruang penyelenggaraan kegiatan (Adnantara, 2026). Pengembangan kawasan tersebut menunjukkan adanya pergeseran arah pembangunan pariwisata di Ubud, dari penyediaan fasilitas pendukung wisata menjadi kawasan komersial yang memenuhi kebutuhan komunitas ekspatriat dan wisata kelas atas, sehingga kawasan Parq di Ubud dengan cepat menjadi pusat perhatian, khususnya di kalangan warga negara Rusia yang jumlahnya meningkat pesat di Bali selama pandemi COVID-19. Akibatnya, kebutuhan terhadap lahan semakin meningkat sehingga ruang agraris yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian mulai mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi bagi aktivitas investasi dan bisnis pariwisata.

Pergeseran arah pemanfaatan ruang tersebut tercermin dalam pembangunan Parq Ubud yang berdiri di atas kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas sekitar 1,8 hektare (Tempo, 2025). Selain itu, pembangunan kawasan tersebut juga melibatkan penguasaan 34 Sertifikat Hak Milik (SHM) milik masyarakat lokal yang digunakan untuk menunjang operasional kawasan wisata (DetikBali, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa perluasan pembangunan tidak hanya mengubah fungsi lahan pertanian menjadi kawasan komersial, tetapi juga menggeser pola penguasaan lahan yang semula didominasi oleh masyarakat lokal menjadi semakin terkonsentrasi pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan investasi. Dengan demikian, alih fungsi lahan dalam kasus Parq Ubud tidak lagi sekadar mencerminkan perubahan penggunaan ruang, melainkan juga memperlihatkan perubahan hubungan masyarakat terhadap aset agraris yang selama ini menjadi sumber penghidupan.

Berkurangnya akses dan kontrol masyarakat terhadap lahan agraris tercermin dari semakin besarnya tekanan yang dihadapi petani untuk mempertahankan kepemilikan lahannya di tengah pesatnya perkembangan investasi pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Suyadnya (2021), petani di Ubud mengaku terus menerima tawaran pembelian tanah dengan harga tinggi, sementara perlindungan terhadap keberlanjutan lahan pertanian dinilai masih lemah. Selain mendorong terjadinya penjualan lahan, perkembangan pariwisata juga memicu pembangunan fisik yang

mengganggu sistem irigasi serta membatasi akses masyarakat terhadap ruang-ruang agraris akibat privatisasi lahan untuk kepentingan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekspansi investasi pariwisata tidak hanya mengubah fungsi lahan, tetapi juga melemahkan keberlangsungan Subak sebagai organisasi sosial yang mengatur distribusi air, kerja sama petani, dan pengelolaan lahan secara kolektif, sekaligus mempersempit ruang gerak masyarakat dalam mempertahankan sumber daya pertanian mereka.

Realitas tersebut dipertegas oleh laporan BBC Indonesia (2024) yang menunjukkan maraknya papan bertuliskan "dijual" yang tertancap di lahan-lahan sawah di Ubud. Banyak petani akhirnya memilih menjual lahannya karena pendapatan dari sektor pertanian tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, petani juga menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya air, sementara sektor pariwisata memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memanfaatkan ketersediaan air regional. Destishinta dan Priadiantoro (2025) mencatat bahwa lebih dari 65% konsumsi air regional digunakan oleh sektor pariwisata. Akumulasi kondisi tersebut menyebabkan sektor pertanian semakin sulit dipertahankan sebagai sumber penghidupan utama sehingga mendorong sebagian masyarakat beralih bekerja pada sektor jasa dan pariwisata.

Perubahan mata pencaharian tersebut berdampak pada bergesernya struktur sosial masyarakat agraris di Ubud. Semula masyarakat Ubud hidup dalam struktur sosial agraris yang bertumpu pada solidaritas komunitas serta nilai-nilai adat. Namun, semakin berkembangnya pariwisata, lahan pertanian yang sebelumnya menjadi basis produksi dan sumber penghidupan masyarakat perlahan berubah menjadi komoditas ekonomi yang diperjualbelikan untuk kepentingan investasi. Kondisi tersebut memunculkan kelompok-kelompok ekonomi baru yang didominasi oleh investor, pengembang, dan pelaku usaha pariwisata, sementara sebagian masyarakat lokal semakin bergantung pada pekerjaan di sektor jasa dan perdagangan. Berkurangnya jumlah petani berdampak langsung pada melemahnya partisipasi dalam sistem Subak yang selama ini menjadi fondasi pengelolaan irigasi sekaligus memperkuat kehidupan komunal masyarakat agraris. Akibatnya, hubungan sosial yang sebelumnya dibangun melalui kerja sama kolektif dalam aktivitas pertanian mulai bergeser menuju orientasi ekonomi yang lebih individual. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan Parq Ubud tidak hanya mengubah penggunaan lahan pertanian, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan sistem agraris yang menjadi pilar kehidupan masyarakat di kawasan Ubud. Perubahan tersebut kemudian menjadi titik awal terjadinya transformasi struktur sosial masyarakat agraris.

2. Peran Kebijakan Negara dalam Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Agraris

Pembangunan Parq Ubud memunculkan tekanan terhadap sumber daya agraris yang sebelumnya dikelola dan diakses secara komunal. Seiring berkembangnya investasi pariwisata, sebagian ruang agraris beralih fungsi menjadi kawasan komersial yang didominasi oleh kepentingan investasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, tetapi juga oleh kebijakan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur tata ruang dan perizinan pembangunan.

Secara normatif, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum bagi penegakan hukum dalam konteks pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata. Di tingkat daerah, regulasi tersebut antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No. 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis

Risiko (Adnantara, 2026). Sementara itu, guna menjaga keberadaan lahan pertanian, pemerintah provinsi Bali turut menetapkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang bertujuan melindungi lahan pertanian dengan menjamin ketahanan pangan, keberlanjutan produksi pertanian, serta mengendalikan laju alih fungsi lahan dan menetapkan kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai bagian dari upaya mempertahankan ruang agraris yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial (Darmawansyah et al., 2026). Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa secara kebijakan negara telah memiliki instrumen hukum untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian ke fungsi nonpertanian.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Pembangunan Parq Ubud tetap berlangsung tanpa kesesuaian perizinan dan tidak memenuhi ketentuan tata ruang yang berlaku. Fakta tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang.

Data empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan laporan CNN Indonesia (2025), Parq Ubud berdiri pada kawasan yang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan melibatkan penguasaan 34 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik masyarakat dengan luas mencapai sekitar 1,8 hektare. Temuan tersebut diperkuat oleh Dinas PUPR Gianyar yang mengidentifikasi bahwa pembangunan Parq Ubud berada pada tiga zona, yaitu zona P1 tanaman pangan (LSD dan LP2B), zona perkebunan (P3), dan zona pariwisata (TribrataNews, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang dirancang untuk melindungi kawasan pertanian dengan praktik pembangunan yang berlangsung di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mengendalikan tekanan investasi terhadap ruang agraris.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari orientasi kebijakan pemerintah daerah pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di sektor pariwisata. Orientasi pembangunan yang menempatkan investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi membuka peluang bagi berkembangnya kawasan-kawasan komersial baru di wilayah yang sebelumnya didominasi oleh aktivitas pertanian. Dalam konteks tersebut, lahan pertanian secara bertahap dipandang sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai investasi lebih tinggi dibandingkan fungsi produktifnya sebagai lahan pangan. Konsekuensinya, kepentingan perlindungan ruang agraris cenderung terpinggirkan ketika berhadapan dengan agenda pembangunan ekonomi yang berorientasi pada investasi.

Dalam jangka panjang, orientasi kebijakan yang lebih akomodatif terhadap investasi turut mempercepat perubahan struktur sosial masyarakat agraris. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pariwisata menyebabkan petani kehilangan penguasaan atas aset produksi utama berupa tanah sehingga otonomi ekonomi mereka semakin melemah. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat melepaskan kepemilikan lahannya dan beralih bekerja pada sektor pariwisata yang berkembang di kawasan Ubud. Bersamaan dengan itu, struktur sosial masyarakat agraris mengalami diferensiasi yang semakin nyata antara kelompok yang memperoleh manfaat ekonomi dari berkembangnya industri pariwisata (misalnya pemilik tanah dan pengusaha wisata) dengan masyarakat yang bergantung pada pekerjaan di sektor jasa atau tidak terlibat langsung dalam industri pariwisata.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan negara dalam pengelolaan tata ruang tidak hanya menentukan arah pemanfaatan lahan, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial masyarakat agraris. Perubahan tersebut menjadi dasar untuk memahami bagaimana relasi antara negara, investasi, dan masyarakat lokal membentuk ketimpangan yang selanjutnya dianalisis melalui perspektif Teori Ketergantungan.

3. Analisis Alih Fungsi Lahan Parq Ubud dalam Perspektif Teori Ketergantungan

Teori Ketergantungan memandang bahwa pembangunan tidak selalu menghasilkan kemajuan yang merata, melainkan dapat membentuk hubungan yang tidak seimbang antara pihak yang menguasai modal dengan pihak yang bergantung (Hatu & Hatu, 2022; Subhilhar, 2022). Dalam temuan penelitian ini, perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana pembangunan Parq Ubud tidak hanya mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan komersial, tetapi juga mendorong perubahan struktur sosial masyarakat agraris melalui ketimpangan dalam penguasaan sumber daya agraris. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa investasi pariwisata telah menggeser posisi masyarakat lokal dari kelompok yang menguasai aset produksi menjadi kelompok yang semakin bergantung pada perkembangan sektor pariwisata.

Andre Gunder Frank melalui konsep *Development of Underdevelopment* menjelaskan bahwa keterbelakangan di negara berkembang bukan merupakan kondisi alamiah, melainkan akibat dari hubungan yang eksploitatif antara pihak yang menguasai modal (*core*) dengan pihak yang bergantung (*periphery*) (Jamaludin, 2016). Dalam hubungan tersebut, perkembangan kapitalisme di wilayah pinggiran tidak berlangsung secara mandiri, tetapi berkembang sebagai kapitalisme berpenyakit (*the development of underdevelopment*) yang cenderung mengisap sumber daya dan kekayaan masyarakat lokal demi kepentingan akumulasi modal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penguasa modal, sementara masyarakat lokal menerima manfaat yang relatif terbatas. Dalam konteks penelitian ini, fenomena tersebut tercermin dalam pembangunan Parq Ubud didukung oleh investasi swasta dengan kemampuan yang lebih besar dalam menguasai lahan, menentukan arah pembangunan, serta memanfaatkan potensi ekonomi kawasan. Sebaliknya, masyarakat lokal secara bertahap kehilangan sebagian akses terhadap lahan pertanian yang sebelumnya menjadi aset produksi utama sehingga posisi mereka dalam struktur sosial semakin bergeser dan bergantung pada perkembangan sektor pariwisata sebagai sumber penghidupan.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pemikiran Theotonio Dos Santos yang menyatakan bahwa hubungan ketergantungan terjadi ketika perkembangan suatu wilayah ditentukan oleh kepentingan pihak yang lebih dominan, sedangkan wilayah lain mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari perkembangan tersebut (Hatu & Hatu, 2022). Dalam kasus Parq Ubud, arah pembangunan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan investasi pariwisata dibandingkan dengan upaya mempertahankan fungsi agraris kawasan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat lokal menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi melalui penjualan lahan, peralihan mata pencaharian, maupun keterlibatan sebagai tenaga kerja pada sektor pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat agraris tidak lagi memiliki posisi yang setara dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya, melainkan semakin bergantung pada dinamika investasi yang berkembang di kawasan tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, alih fungsi lahan pada pembangunan Parq Ubud tidak hanya merepresentasikan perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan pariwisata, tetapi juga mencerminkan terbentuknya hubungan ketergantungan antara

investor dan masyarakat agraris lokal. Pergeseran penguasaan sumber daya agraris yang berlangsung melalui penetrasi investasi pariwisata telah memengaruhi posisi masyarakat lokal dalam struktur sosial, dari kelompok yang sebelumnya menguasai dan mengelola lahan menjadi semakin bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber penghidupan. Dengan demikian, Perspektif Teori Ketergantungan mampu menjelaskan bahwa perubahan struktur sosial masyarakat agraris di Ubud tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari modernisasi, melainkan juga dipengaruhi oleh relasi pembangunan yang berlangsung secara tidak seimbang melalui dominasi modal dan investasi pariwisata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Parq Ubud sebagai bagian dari ekspansi investasi pariwisata telah mendorong alih fungsi lahan pertanian yang berdampak pada perubahan struktur sosial masyarakat agraris di Ubud. Alih fungsi lahan tidak hanya mengubah pemanfaatan ruang agraris menjadi kawasan komersial, tetapi juga menggeser penguasaan sumber daya agraris, melemahkan keberlangsungan sistem Subak, serta mendorong perubahan mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian menuju sektor jasa dan perdagangan. Meskipun pemerintah telah memiliki berbagai regulasi untuk melindungi lahan pertanian dan mengendalikan pemanfaatan ruang, implementasinya belum sepenuhnya mampu menahan tekanan investasi terhadap kawasan agraris. Analisis melalui Perspektif Teori Ketergantungan menunjukkan bahwa pembangunan Parq Ubud membentuk hubungan yang tidak seimbang antara investor sebagai pemilik modal dan masyarakat agraris lokal yang semakin kehilangan penguasaan atas aset produksi serta bergantung pada perkembangan sektor pariwisata sebagai sumber penghidupan. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan struktur sosial masyarakat agraris di Ubud tidak semata-mata merupakan konsekuensi modernisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi pembangunan yang berlangsung secara tidak seimbang melalui penetrasi investasi pariwisata. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan, investasi pariwisata, dan perubahan struktur sosial masyarakat agraris merupakan proses yang saling berkaitan dan dapat dijelaskan secara komprehensif melalui Perspektif Teori Ketergantungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnantara, K. F. (2026). Kepastian Hukum Dalam Pelanggaran Regulasi Parq Kampung Rusia Di Ubud Bali. *Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan Dan Kebudayaan*, 4(1). <https://ejournal.universitastabanan.ac.id/index.php/jissiwirabuda/article/view/433>
- BBC. (2024, December 3). *Bali: Kisah warga yang 'terjepit' di tengah perkembangan wisata dan kebutuhan hidup*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14ld7l1gyeo>
- CNN. (2025, January 27). *Bule Jerman Kuasai 34 Sertifikat Tanah Milik Warga Bali*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250127075628-20-1191791/bule-jerman-kuasai-34-sertifikat-tanah-milik-warga-bali>
- Darmawansyah, Bambang Sulisty, & Henry Farizal. (2026). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Penataan Ruang Wilayah: Tinjauan Literatur. *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik*, 4(1), 41-53. <https://doi.org/10.61132/venus.v4i1.1331>

- Destishinta, L. Y., & Priadianoro, B. C. (2025). Sosialisme dalam Utopia Subak: Pergeseran dan Krisis Nilai Kolektivitas di Era Bali Modern. *MULTIKULTURA*, 4(4). <https://doi.org/10.7454/multikultura.v4i4.1197>
- DetikBali. (2025, January 20). “Kampung Rusia” di Ubud Ditutup! <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7741398/kampung-rusia-di-ubud-ditutup>
- Hatu, R. A., & Hatu, D. R. (2022). *SOSIOLOGI PEMBANGUNAN (Suatu Tinjauan Perspektif Teori dan Empirik)*. CV Mitra Ilmu.
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi Pembangunan* (1st ed.). CV Pustaka Setia. <https://digilib.uinsgd.ac.id/3650/1/SOSIOLOGI%20PEMBANGUNAN.pdf>
- Maheswari, N. N. A., & Budhi, M. K. S. (2025). Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(04), 341-361. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EEP.2025.v14.i04.p05>
- NusaBali. (2025, September 20). *NUSABALI.com—2019-2024 Bali Kehilangan 6.521 Hektare Sawah*. <https://www.nusabali.com/index.php/berita/201776/2019-2024-bali-kehilangan-6521-hektare-sawah>
- NusaBali. (2026, February 3). *NUSABALI.com—Luas Panen Padi di Bali Terus Menyusut, Kegagalan Program atau Dampak Alih Fungsi Lahan?* <https://www.nusabali.com/berita/212139/luas-panen-padi-di-bali-terus-menyusut-kegagalan-program-atau-dampak-alih-fungsi-lahan>
- Pamungkas, M. I. T., Purwanto, D., & Dwi Astutik. (2024). Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Petani di Kelurahan Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 159-172. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3374>
- Picard, M. (2006). *Bali: Pariwisata budaya dan budaya pariwisata*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Pratama, I. G. N. W., Lilasari, L. N. T., & Widana, I. B. G. A. (2024). Dampak Pariwisata Terhadap Ekonomi di Destinasi Ubud Pasca Pencabutan Pembatasan Perjalanan. *Jurnal Kepariwisata*, 23(2), 120-132. <https://doi.org/10.52352/jpar.v23i2.1522>
- Ramadhan, S., & Murti, R. P. W. (2024). Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Sarbagita. *Tunas Agraria*, 7(3), 303-325. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>
- Santi, N. wayan A., & Utomo, B. W. (2021). Analisis Perubahan Kegiatan Ekonomi Lokal Di Ubud Bali pada Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 268-273.
- Subhilhar. (2022). Etika Pembangunan: Kajian Alternatif dalam Studi Pembangunan. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v1i1.8622>
- Suyadnya. (2021). Tourism Gentrification in Bali, Indonesia: A Wake-up Call for Overtourism. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 26(2). <https://doi.org/10.7454/MJS.v26i2.12930>

- Tempo. (2025, January 28). *Fenomena Kampung WNA di Bali: Asal-usul dan Implikasi Sosial yang Ditimbulkan* | tempo.co. <https://www.tempo.co/hiburan/fenomena-kampung-wna-di-bali-asal-usul-dan-implikasi-sosial-yang-ditimbulkan-1199792>
- Tjondronegoro, S. M. P. (1999). *Sosiologi Agraria: Kumpulan tulisan terpilih* (1st ed.). BANDUNG : YAYASAN AKATIGA.
- TribrataNews. (2025, January 25). *Polda Bali Tetapkan Direktur Parq Ubud Sebagai Tersangka K*. Tribrata News. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-bali-tetapkan-direktur-parq-ubud-sebagai-tersangka-kasus-alih-fungsi-lahan-83413>
- Vitiara, M. D., Putri, A. A., & Triadi, J. (2024). Analisis dampak alih fungsi lahan subak terhadap kerawanan bencana banjir (Studi kasus di desa Jatiluwih, kecamatan Penebel, kabupaten Tabanan, provinsi Bali). *SAFSES*, 1(1), 20-33.
- Windia, W., Sudarta, W., & Astiti, W. S. (2015). *Sistem Subak di Bali: Kajian Sosiologis*. Udayana Press.
- Wulandari, E., Arivia, A. F., & Saragih, A. (2025). Desain Penelitian Studi Kasus Dalam Metodologi Kualitatif. *Qalam Lil Athfal*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.58822/qla.v3i2.426>